

12-1-2011

Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung

Sulistiyowati Irianto

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia, sulis@pacific.net.id

Risma Margaretha

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia>

Recommended Citation

Irianto, S., & Margaretha, R. (2011). Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15(2), 140-150. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i2.1420>

This Original Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Makara Human Behavior Studies in Asia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**PIIL PESENGGIRI:
MODAL BUDAYA DAN STRATEGI IDENTITAS ULUN LAMPUNG**

Sulistiyowati Irianto^{*)} dan Risma Margaretha

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

^{*)}E-mail: sulis@pacific.net.id

Abstrak

Etnifikasi atau proses peminggiran penduduk lokal sebagai akibat migrasi di Lampung menyebabkan *ulun* Lampung menjadi minoritas di tengah-tengah heterogenitas budaya pendatang. Dalam menghadapi marginalisasi ini, mereka membangkitkan tradisi (invensi tradisi) dalam rangka memperkuat kesadaran kolektif melalui pemaknaan *piil pesenggiri* (harga diri) yang direproduksi dan diartikulasikan sebagai representasi identitas. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemaknaan *piil pesenggiri* sebagai kedayatahan identitas *ulun* Lampung yang mereposisi identitasnya, terkait dengan bagaimana *piil pesenggiri* diolah sebagai modal budaya dan strategi budaya di dunia sosial mereka. Sebagai penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang *piil pesenggiri* berdasarkan pengalaman dalam dunia sosial yang dijalaninya. Temuan penelitian ini, bahwa rekonstruksi identitas *ulun* Lampung tidak terlepas dari perkembangan dinamika politik dan budaya dalam ruang dan waktu. Produksi dan reproduksi *piil pesenggiri* sebagai invensi tradisi, yang diolah menjadi modal budaya dan strategi identitas merupakan resistensi terhadap pendatang sebagai reteritorialisasi dan identifikasi diri. Mengubah stigma negatif *piil pesenggiri* yang selama ini dijadikan "perisai budaya" dalam berbagai tindakannya adalah konstruksi *ulun* Lampung dengan citra baru melalui pendidikan, simbol budaya maupun jalur politik, merupakan proses untuk diakui identitasnya dalam struktur sosial. Reproduksi *piil pesenggiri* menunjukkan *piil* sebagai identitas bukan produk yang statis tetapi kontekstual dan tidak dapat dipisahkan dari habitus *ulun* Lampung.

Piil Pesenggiri: Cultural Capital and Identity Strategy of Ulun Lampung

Abstract

Etnifikasi or marginalize the local ethnic as result of migration process in Lampung has caused *ulun* Lampung's to become a minority amidst of the cultural heterogeneity immigrants. In response to this marginalization, they re-invented tradition in order to strengthen their collective consciousness through the meaning of *piil pesenggiri* (self esteem) that's reproduced and articulated as a representation of identity. The study aims to explain how the meaning *piil pesenggiri* has been reproduced in the repositioning of *ulun* lampung's cultural identity, related to how *ulun* lampung interpret *piil pesenggiri* as a cultural capital and strategy cultural. The data were obtained through in-depth interviews from a number of informants to obtain a comprehensive description of *piil pesenggiri* based on their experiences in the social world. The results showed that the reconstruction of Lampung *ulun* identity is inseparable from the development of the political and cultural dynamics in space and time. The production and reproduction of *piil pesenggiri* as an invention is processed to serve a cultural capital and identity strategy on the social structure vis-a-vis migrants can be viewed as a reterritorialization of identity. Changing the negative stigma that has *piil pesenggiri* used as cultural "shields" manifested in the various actions is the construction of *ulun* lampung with a new image through field of education, cultural symbols, or political field, and a process for gaining recognition in terms of their existence identity in the social structure. The reproduction of *piil pesenggiri* in social structure Lampung society shows that *piil* is not a static entity but an ever-changing one and it is inseparable from the *ulun* Lampung's habitus.

Keywords: piil pesenggiri, invented tradition, reproduction, identity, strategy

1. Pendahuluan

Umumnya, suatu kelompok masyarakat mudah diidentifikasi melalui kebudayaan lokalnya, yang

merujuk pada tatanan sosial yang dimiliki, artinya ada "aturan main" yang dipahami bersama oleh kelompok itu, serta ada ciri khusus yang digunakan untuk membedakan individu yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Sokefeld (1999), identitas menjadi suatu label yang dipakai atau diberikan untuk mengelompokkan serta membedakan diri (*self*) dengan yang lain (*other*). Sebagaimana yang terjadi pada etnis Lampung, berbagai pertanyaan yang sering muncul “adakah orang Lampung?; Lampung yang dimaksud transmigran Jawakah?; apa yang khusus dari mereka?”

Sangat disadari bahwa heterogenitas dan dominasi pendatang di daerah Lampung tidak dapat dipisahkan dari aspek historis interaksi *ulun* Lampung (Orang Lampung atau Etnis Lampung) dengan masyarakat luar yang ditengarai sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu, antara lain dengan Cina, Banten, Bugis, dan Jawa baik melalui program kolonisasi maupun transmigrasi (Hadikusuma, 1990). Terlihat jelas bahwa migrasi internasional dalam perspektif kontemporer memberi sumbangan kepada besarnya kompleksitas suatu fenomena atau dengan kata lain perpindahan migran mempertajam perbedaan etnik dalam banyak masyarakat (Castles & Miler, 2003). Menurut data BPS (2000, 2003, 2010), jumlah *ulun* Lampung sangat sedikit dibandingkan dengan populasi pendatang. Perkiraan komposisi penduduk berdasarkan suku bangsa adalah Jawa sebesar 61,88%, Lampung sebesar 11,92%, Sunda (termasuk Banten) sebesar 11,27%, Semendo dan Palembang sebesar 3,55%, dan suku bangsa lainnya (Bengkulu, Batak, Bugis, Minang dan lain-lain) sebesar 11,35%. Komposisi tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kontak *ulun* Lampung dengan orang lain selama ratusan tahun sehingga mereka lebih terbuka dan identitasnya semakin cair. Selain itu, perkawinan dengan etnis lain juga menjadikan batas-batas identitas menjadi kabur sehingga sukar menentukan batas-batas yang menunjuk pada suatu batasan sosial dan wilayah (Barth, 1969). Dilihat dari perspektif migrasi, apa yang terjadi pada *ulun* Lampung, mereka mengalami proses pemarginalan penduduk setempat di tanah kelahirannya yang membuat mereka tidak berkuasa atas lahan tersebut, atau disebut dengan istilah etnikisasi (Oommen, 1997). Artinya, migrasi dan para migrannya telah membuat etnis lokal menjadi minoritas di daerah sendiri yang secara simbolik merupakan tanah tumpah darah.

Kondisi masyarakat Lampung yang semakin dinamis memunculkan pertanyaan, apakah *ulun* Lampung masih tetap bersikap tenang dan tanpa riak dalam menyikapi dominasi pendatang? Munculnya kesadaran untuk bangkit dan merepresentasikan diri agar sejajar dengan pendatang dapat dipandang sebagai resistensi *ulun* Lampung terhadap “gempuran” budaya pendatang yang heterogen dan dominan. Karena semakin termarginalkan, sangatlah wajar jika mereka mendefinisikan ulang identitasnya melalui pemaknaan nilai-nilai yang terkandung dalam *piil pesenggiri* (harga diri) sebagai representasi identitas etnis. Dengan demikian, penelitian ini mengungkapkan sifat dinamis *piil pesenggiri* yang

direpresentasikan secara kontekstual sebagai modal untuk berstrategi yang terwujud dalam perilaku pada berbagai dimensi dalam dunia sosial *ulun* Lampung sehingga menjadi alat perjuangan melawan marginalisasi (Comaroff & Comaroff, 2009).

Kondisi-kondisi yang diuraikan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana *ulun* Lampung memaknai *piil pesenggiri* sebagai modal budaya dan strategi identitas untuk bertindak dalam dunia sosialnya?” Melalui pemaknaan ulang *piil pesenggiri* yang kontekstual, maka secara khusus tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan (a) bagaimana *ulun* Lampung mendefinisikan kembali identitasnya melalui *piil pesenggiri* sebagai bentuk ketahanan identitasnya, dan (b) bagaimana strategi *ulun* Lampung untuk bertindak dengan memaknai *piil pesenggiri* sebagai modal budaya dalam dunia sosialnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *multisited*, sehingga semua *ulun* Lampung memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi informan. Data dan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan permasalahan penelitian dikumpulkan dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil olahan data orang lain baik berupa dokumen, laporan, publikasi, dan sebagainya. Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mencakup pengujian reflektif atas data sehingga memberi peluang untuk terus menerus melakukan uji konsep dengan data-data dan bukti untuk menemukan simpulan tentang reproduksi identitas lokal melalui pemaknaan *piil pesenggiri*.

3. Hasil dan Pembahasan

***Piil pesenggiri* dalam berbagai suara: Pembentukan stereotip.** *Api ubat malu indung? Mati anakku!* (Informasi ini dikisahkan oleh pak Rukmana). Sepenggal kalimat ini (pernah diajukan oleh Raden Intan, pahlawan nasional Lampung, ketika bertanya kepada ibunya) menunjukkan makna hakiki sebuah harga diri, yaitu memilih mati jika harga diri dilecehkan. Mengacu pada kalimat pendek di atas, tidak heran jika harga diri merupakan harga mati bagi setiap *ulun* Lampung. Harga diri atau yang disebut *piil pesenggiri* menjadi kata sakti, dan bahkan menjadi “menu utama” karena begitu seringnya kalimat tersebut dilontarkan dan didengar sejak masa kanak-kanak bahkan sampai tua sekalipun. *Piil pesenggiri* seolah-olah adalah benda yang dibawa kemana-mana sebagai “senjata sosial” untuk berhadapan dengan orang lain. Akibatnya, dalam implementasinya di lapangan banyak yang salah

mengartikan seolah-olah *piil* itu suatu kesombongan, kekasaran, ataupun predikat lainnya sehingga konotasi yang timbul menjadi negatif. Hal tersebut berdampak pada munculnya *stereotype* yang dikenakan kepada *ulun* Lampung, sehingga nasihat yang sering diberikan orang ketika akan bertemu dengan mereka adalah “*hati-hati dengan orang Lampung, ke mana-mana selalu bawa piil.*” Label demikian terbentuk karena *piil pesenggiri* memang ditanamkan, dan sejak kecil anak-anak Lampung telah dibekali senjata *piil*. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh pak Rukmana sebagai berikut:

“*Sebagai orang Lampung, benar kalau piil pesenggiri adalah acuan hidup kami, meski di sisi yang lain, piil pesenggiri sendiri saat ini banyak disalah artikan oleh sebagian orang yang kurang mengerti makna hakiki dari piil itu sendiri. Seolah-olah piil itu adu kehebatan dan menunjukkan kehebatan secara fisik, atau piil itu menjadi kesombongan dan keegoisan. Makanya kalau anak-anak muda sekarang ditanya tentang piil pasti dalam pikirannya kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya. Jadi jangan disalahkan kalau banyak anak muda yang mengatakan piil itu sudah gak perlu karena dipakai untuk gagah-gagahan. Habis kalau sudah bicara piil pasti bawaannya golok, atau benda-benda tajam lainnya, atau sifat yang mudah tersinggung terus mengkambinghitamkan piil.*”

Bagi generasi muda, *piil pesenggiri* juga dianggap beban, apalagi jika dikaitkan dengan perkawinan sesuai tatacara adat Lampung yang lengkap, biaya mahal, dan didalam rangkaian upacaranya seolah-olah mempertontonkan *piil-piil* dari setiap keluarga. Ekspresi anak-anak muda terlihat dari pernyataan Iwan, salah seorang informan:

“*Malas ah menikah dengan sesama Lampung, selain biayanya mahal, ribet, dan terkesan menunjukkan tinggi rendahnya status seseorang. Menikah dengan gadis Lampung itu pakai kriteria, misalnya si gadis yang biasa saja, gak sarjana, gak kerja, maharnya 25 juta, kalau si gadis PNS, maka maharnya 50 juta. Nah, kalau si gadis sarjana dan PNS, maharnya 100 juta. Belum kalau ada kategori lain seperti cantik, anak orang kaya, wah makin mahal..., lebih baik dijadikan modal. Makanya menjadi PNS adalah kebanggaan bagi ulun Lampung.*”

Piil pesenggiri juga seringkali diidentikkan dengan kekerasan. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang, seringkali dilegitimasi atas nama *piil pesenggiri*, sehingga semakin memperburuk citra *ulun* Lampung dengan konsep *piil*-nya. Ada tindakan yang selalu membawa *piil* sebagai “senjata sosial,” dan oleh sebagian kalangan dianggap kurang relevan untuk dipertahankan dan harus ada perubahan dalam mengimplementasikan *piil*. Contohnya adalah kerusuhan seperti peristiwa di Tulang Bawang dan di Fajar Bulan Lampung Barat, Sidomulyo yang melibatkan orang Bali dengan Lampung, dipicu oleh ketersinggungan *piil* yang berdampak kerusuhan massal. Adanya kerusuhan massal tersebut dikisahkan informan:

“*Memang pernah terjadi perkelahian antar orang Bali dengan orang Lampung yang pada akhirnya menyebabkan dibakarnya terminal Tulang Bawang. Sebenarnya perkelahian itu bermula antara kernet/pengelola bis Puspajaya yang pemiliknya orang Bali. Semua pekerja Puspajaya adalah orang Bali, dan tidak melibatkan orang Lampung yang ada di sekitar terminal. Orang Lampung ingin ambil bagian sebagai pekerja di situ. Masalahnya sih, orang Balinya agak sombong gitu, harusnya bagi-bagi rezeki. Masalah yang sangat sepele, tetapi menimbulkan ketidaksenangan pada kedua belah pihak sehingga terjadilah perkelahian yang melibatkan massa Bali dan Lampung; bahkan sampai membakar terminal. Peristiwa itu sudah lama, mungkin sekitar tahun 1998-an. Sampai sekarang terminalnya sudah tidak berfungsi. Pemkab sebenarnya sudah beberapa kali mencoba memperbaikinya, tetapi tidak berhasil. Dengar-dengar orang Bali udah buat sesuatu atau nanam sesuatu di tengah terminal supaya nggak bisa digunakan lagi. Tau sendiri orang Bali kan suka pake ilmu mistik gitu.*”

Sesungguhnya, inti *piil pesenggiri* merujuk pada harga diri atau kehormatan *ulun* Lampung yang terdiri atas *dignity* (*pesenggiri*), keramatahman (*nemui nyimah*), nama besar (*juluk adok*), kemampuan berbaur dengan semua (*nengah nyappor*), dan gotong royong (*sakai sambayan*). Kelima unsur tersebut merupakan nilai yang melingkupi hampir semua aspek kehidupan *ulun* Lampung dari ritual kelahiran hingga kematian. Keluarga selalu menjadi entitas yang didalamnya berlangsung banyak aktivitas. Sebagai sebuah sistem tindakan, keluarga juga terdiri atas pelaku-pelaku yang saling berhubungan. Dalam beberapa kapasitas, keluarga mempunyai kepentingan-kepentingan sebagai dasar tindakan untuk menegakkan kehormatannya.

Salah satu bentuk kehormatan adalah menikah dengan sesama *ulun* Lampung. Dalam beberapa perkawinan antar-etnis, sering terjadi kurangnya pengakuan keluarga akan pasangan karena dianggap belum sah secara adat sehingga perkawinan demikian dianggap merusak kehormatan. Karenanya, untuk memulihkan kembali nama dan gelar kehormatan, atau untuk mendapatkan kembali gelar yang seharusnya menjadi miliknya akibat belum mendapat persetujuan adat atas perkawinannya, tidak jarang laki-laki Lampung kemudian menikah lagi dengan sesama *ulun* Lampung. Hal ini dilakukan agar semua hak-hak istimewa yang menunjukkan derajat ke-*piil*-annya kembali dimiliki. Oleh karena itu, jika seseorang yang non Lampung menikah dengan *ulun* Lampung, maka harus melalui sebuah proses adat, yaitu ‘dilampungkan’ terlebih dulu baru pernikahannya dianggap sah. Untuk memperoleh *piil* memang harus ada pengorbanan sesuai dengan pepatah Lampung “*bibit mengandung biang, biang mengandung bibit*”.

Pengalaman direndahkan karena perkawinan beda etnis, dialami St (bukan nama sebenarnya), saat ini dikenal sebagai salah satu tokoh adat masyarakat Lampung, mengaku bahwa ketokohnya seperti sekarang ini tidak diperoleh dengan mudah namun dengan pengorbanan dan airmata orang-orang yang dicintainya, sehingga ia harus kawin lagi dengan perempuan sesuai adat Lampung demi mendapatkan dan mempertahankan *piil pesenggiri*. Beratnya tanggung jawab sebagai anak laki-laki tertua (*punyimbang*) dalam keluarga besar baik secara ekonomi, sosial, budaya, menjadi dasar mengapa St harus menikah kembali dengan sesama Lampung juga. Namun ada hambatan untuk mendapatkan haknya sebagai *punyimbang* karena perkawinannya dengan perempuan bukan Lampung (istrinya dari suku Jawa) yang menyebabkan ia disingkirkan dalam keluarga. Padahal dalam perkawinannya ia sudah memiliki empat orang anak. Sampai pada suatu saat ketika dalam acara adat ia dilecehkan dan tersinggung *piil* nya karena dipermalukan di depan khalayak umum. Peristiwa itu membuatnya terluka, dan bertanya apa gerangan penyebabnya? Ternyata, perkawinan beda suku yang dijalannya menjadi sumber masalah. Akhirnya, sebagai *ulun* Lampung yang ber-*piil* dia bersumpah untuk mengembalikan harga dirinya, dengan menangis dan bersimpuh di kaki ibunya ia meminta dicarikan isteri, tidak peduli apakah dia cacat, buta, jelek, yang penting perempuan Lampung. Berikut ini penggalan penurunan St:

"Sebagai anak punyimbang seluruh keluarga mengharapkan saya untuk menikah dengan orang Lampung juga. Namun harapan itu saya abaikan karena saya menikah dengan orang Jawa. Akibatnya saya tidak mendapatkan hak-hak dalam adat. "Suatu hari di pesta adat saya merasa harga diri (piil) diremehkan, dan sangat tidak dianggap sama sekali. Dalam acara adat kala itu, ada semacam pembagian berupa uang. Masing-masing yang duduk di ruangan itu mendapat bagian, namanya disebutkan. Namun apa yang terjadi, yang membagi uang itu melewati saya dan tidak menyebutkan nama saya. Bahkan ketika saya menegurnya dia dengan sisnis mengatakan, 'oh kamukah itu Sut, kirain siapa", namun tetap tidak memberikan apapun kepada saya, tetapi memberikan sekeping uang itu ke sebelah saya. Bahkan ada yang mengatakan" wah...saya tidak melihat kamu hadir disini...kirain tidak ada". Tidak terkirakan sakit hati saat itu. Piil saya tersinggung luar biasa, hampir saya tuja (tusuk dengan pisau) dia. Kemudian saya bertanya kenapa diperlakukan sedemikian rupa, padahal saya adalah anak laki-laki tertua, anak punyimbang. Jawabannya, justru karena saya anak punyimbang, tetapi kawin tidak begawi (upacara adat lengkap), menikah bukan dengan ulun, sampai matipun tetap akan mendapat perlakuan seperti itu. Hati saya benar-benar terbakar, dengan berlinang airmata saya minta kepada ibu dicarikan perempuan yang mau menjadi istri asalkan perempuan Lampung. Akhirnya saya menikah lagi dengan gadis Lampung dengan acara begawi, tetapi istri yang Jawa tidak saya ceraikan, kedudukannya

bukan sebagai istri utama, karena istri utama haruslah perempuan Lampung".

Piil pesenggiri juga dapat dikategorikan sebagai hukum adat *ulun* Lampung karena ada dan selalu dipakai dalam semua aktivitas sosial, baik dalam perkawinan sebagai inti budaya dalam Lampung ataupun menyelesaikan berbagai sengketa yang biasanya dipicu oleh tanah, perempuan atau pembuatan gelar-gelar adat. Salah satu contoh *piil pesenggiri* yang menjadi hukum adalah sebagaimana *berita terbaru* yang dilansir oleh sebuah [harian lokal](#), yaitu kasus salah tembak yang dilakukan oknum anggota kepolisian di Lampung yang berakhir damai. Perdamaian yang dilakukan secara adat disaksikan warga setempat dan *penyimbang* adat Lampung dengan membayar denda atas pelanggaran tersebut. Penyelesaian secara adat juga dilakukan ketika terjadi konflik karena kesalahpahaman antara orang Bali dengan *ulun* Lampung, antara lain Tulang Bawang, Sidomulyo dengan mengacu pada nilai dalam *piil pesenggiri*.

Nilai-nilai *piil pesenggiri* yang dipandang sebagai undang-undang tidak hanya sekedar berupa pemikiran atau konsep, melainkan juga sebagai sistem nilai yang dirujuk dan diinternalisasi oleh masyarakat. Sisi penting dan signifikan dari *piil pesenggiri* inilah yang tampaknya sejajar dengan konsep *honour* (kehormatan dan harga diri) yang merupakan esensi atau sesuatu yang sangat prinsip karena memiliki sisi kesucian, *prestise*, kemuliaan, dan keagungan (*sacred, prestige, radiance, glory, presence*).

Dalam perspektif tentang kehormatan atau *honour*, *piil pesenggiri* dilihat sebagai suatu integritas dari *nif* atau martabat (Bourdieu, 1979). Dengan demikian, *piil pesenggiri* sebagai kehormatan menjadi bagian dari identitas masyarakat Lampung dan tidak bisa dilihat semata-mata sebagaimana yang tertera dalam Kitab Kuntara Raja Niti, Kitab Kuntara Raja Niti adalah Kitab yang berisi tuntutan moral yang menjadi pedoman masyarakat Lampung. Aksara dalam buku ini ada dua, setengah buku beraksara Lampung kuno, setengahnya beraksara Arab. Kitab ini terdiri atas tujuh belas bab, yang intinya ada 3 pokok hukum yaitu Kuntara (Hukum agama), Raja Niti (Dirgama atau hati nurani) dan Jugul Muda (Karinah atau akibat suatu perbuatan). Pelanggaran terhadap ke tiga pokok persoalan atau pokok hukum akan dikenakan sanksi yang disebut *cempala*, melainkan bagaimana ia menjadi bagian dari tindakan keseharian masyarakat. Kitab Kuntara Raja Niti adalah Kitab yang berisi tuntutan moral yang menjadi pedoman masyarakat Lampung. Aksara dalam buku ini ada dua, setengah buku beraksara Lampung kuno, setengahnya beraksara Arab. Kitab ini terdiri atas tujuh belas bab, yang intinya ada 3 pokok hukum yaitu Kuntara (Hukum agama), Raja Niti (Dirgama atau hati nurani) dan Jugul Muda (Karinah atau akibat suatu perbuatan). Pelanggaran terhadap ke tiga pokok

persoalan atau pokok hukum akan dikenakan sanksi yang disebut *cempala*. Artinya, *piil pesenggiri* selalu berada pada kondisi yang dikontestasikan oleh masyarakat sendiri. Ia meniscayakan adanya silang-sengkarut kekuatan dari banyak pihak untuk mengidentifikasi diri sebagai yang paling mengerti, mewarisi, dan mempraktikkan *piil pesenggiri* dalam kehidupan sehari-hari sehingga *piil pesenggiri* senantiasa menjadi ajang pertarungan dan relasi kekuasaan antar pelaku.

Berdasarkan konsep Bourdieu (1979), kontestasi dalam dunia sosial meliputi dunia dimensi laki-laki dan perempuan. Kontestasi dalam struktur *ulun* Lampung sendiri berupa perjuangan memperoleh harga diri dan kehormatan dalam dunia sosial, yaitu antara mereka sendiri (internal) dan dengan pendatang (eksternal). Dipandang dari perspektif *honour* Bourdieu tersebut, maka kontestasi yang terjadi dalam struktur sosial internal *ulun* Lampung sendirilah yang justru dapat melemahkan posisi mereka ketika berhadapan dengan dunia luar (struktur eksternal). Mereka seakan-akan "sibuk" mengurus hal-hal yang bersifat internal saja sehingga mengabaikan, dan tidak menyadari bahwa mereka telah tertinggal dibandingkan pendatang (eksternal).

Dalam struktur sosial internal masyarakat Lampung, memposisikan anak laki-laki tertua secara istimewa dalam keluarga (*punyimbang*), anak *punyimbang* adalah istilah yang diberikan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga, adalah dasar kontestasi yang telah dibangun sejak dini antar anak dalam keluarga yang menjadi dasar terjadinya kontestasi dalam struktur internal *ulun* Lampung. Keistimewaan yang diberikan pada anak laki-laki tertua, seperti gelar dan kekayaan, hak berbicara dalam adat adalah hak istimewa yang membuat anak lainnya berupaya untuk melebihi saudaranya. Keinginan untuk sejajar dengan anak *punyimbang* yang diberi hak istimewa membuat anak lainnya mencari *piil* baru diluar struktur internalnya. Berbagai cara dilakukan agar dapat memiliki kesejajaran atau memiliki "*piil*" supaya dihargai agar seimbang dengan berkorban harta dan benda. Kondisi inilah yang disebut "sibuk mengurus" yang ada di dalam (internal), sehingga melupakan yang ada di luar (eksternal), yaitu pendatang yang heterogen.

Akhir-akhir ini, terjadi perubahan pemaknaan terhadap *piil* dalam menyikapi dunia yang semakin mengglobal. Hasil dalam proses internalisasi dengan pendatang merupakan pembelajaran, dan dalam relasi itu (lokal-pendatang), mereka mendapatkan pengetahuan baru yang diolah sesuai habitus mereka sehingga menjadi modal berkontestasi dengan pendatang. Dengan kata lain, mereka menggunakan strategi "mengambil" agar sejajar (tetap dengan *piil pesenggiri*) dengan kelompok lain (eksternal), sekaligus ber-*piil* juga dalam struktur internal. Dengan demikian, mereka akan diperhitungkan, dihargai, baik didalam kelompok masyarakatnya sendiri

dan oleh masyarakat lain. Artinya, upaya untuk ber-*piil* ada dua cara, yaitu diwariskan (*ascribed*), dan *piil* yang dicapai melalui usaha (*achievement*). "Mengambil" adalah istilah untuk menggambarkan bekerjanya *ulun* Lampung dalam memproduksi pengetahuan yang mereka adopsi dari pendatang. Dalam hubungan dengan pendatang terjadi pembelajaran dan sosialisasi, dimana *ulun* Lampung belajar banyak hal dari pendatang. Pengetahuan itu mereka olah dan dibawa ke dalam struktur internal atau disebut internalisasi eksternalitas. Pengetahuan itu direproduksi kembali menjadi alat untuk berhadapan dengan pendatang, atau eksternalisasi internalitas (Bourdieu, 1977). Dengan kata lain, mereka mengambil pengetahuan pendatang, belajar dari pendatang, meningkatkan kapasitasnya dan menjadikan pengetahuan yang diperolehnya sebagai "strategi perlawanan" terhadap pendatang. Dalam berhadapan dengan stuktur eksternal, maka *ulun* Lampung harus memiliki modal untuk berkontestasi. Struktur eksternal adalah dunia sosial tempat mereka secara realitas hidup berdampingan dengan berbagai kelompok yang sangat heterogen yang dalam pandangan Bourdieu disebut sebagai ranah (*field*), yakni arena yang di dalamnya terdapat kekuatan yang saling tarik-menarik; ada sistem dan relasi-relasi dalam terjadinya kontestasi. Dalam arena atau ranah inilah terbuka kesempatan bagi mereka untuk berstrategi, berjuang memperoleh hak-haknya, dan *piil pesenggiri* menjadi modal budaya *ulun* Lampung. Selain sebagai modal, *piil pesenggiri* juga menjadi strategi untuk menunjukkan bahwa mereka mampu untuk sejajar dalam rangka mengukuhkan eksistensinya di tengah masyarakat yang dominan dalam berbagai aspek, seperti mengejar ketertinggalan dalam pendidikan, simbol budaya sebagai kekuasaan simbolik, mengambil peluang dalam ranah politik, atau paling tidak mendapat pengakuan dalam struktur eksternal sehingga stigma yang terlanjur diberikan kepada mereka dapat diubah dengan citra baru.

Memang tidak mudah untuk berjuang dalam ranah (struktur eksternal), apalagi menghilangkan stigma yang sudah terbentuk yang dalam sudut pandang etnisitas disebut *labeling*. Labeling adalah suatu kelompok etnik dipersepsikan (positif atau negatif) oleh kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana dituturkan oleh informan, pemaknaan *piil pesenggiri* yang irasional dan identik dengan kekerasan serta berpotensi memicu terjadinya konflik internal maupun eksternal menyebabkan mereka harus berjuang untuk mengubahnya agar menjadi rasional dan proporsional. Alat perjuangan yang tepat, menurut informan, adalah tetap dengan *piil pesenggiri* namun dalam bentuk baru yang bersumber dari tradisi masyarakatnya.

Redefenisi *Piil Pesenggiri*: Modal Budaya dan Strategi Identitas.

Strategi "Sense of Collectivism". Modal merupakan aspek yang menentukan untuk mengetahui posisi

pelaku. Oleh karena itu, pelaku yang memiliki modal besar dapat digolongkan dominan, atau sebaliknya. Jadi, modal dapat dikatakan sebagai dasar untuk melakukan dominasi jika mengacu pada tipologi modal Bourdieu, yakni modal ekonomi, modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik. Ber-*piil pesenggiri* bisa menjadi kontradiktif atau mungkin ironis jika mereka mengalami proses etnifikasi. Betapa tidak, dengan nilai dan prinsip yang merupakan modal, seharusnya mereka tidak terpinggirkan baik secara budaya, ekonomi ataupun dari segi populasi dalam lingkungan budayanya sendiri. Munculnya kesadaran untuk mengukuhkan kembali jatidiri mereka saat ini didukung oleh banyak elemen seperti elitpemerintahan, seniman, tokoh adat, dan akademisi yang semuanya adalah *ulun* Lampung baik yang tinggal di dalam ataupun di luar Lampung.

Peran pemerintah dan kaum elit memang sangat menonjol dalam membangkitkan kesadaran kolektivisme *ulun* Lampung mengukuhkan identitasnya melalui redefinisi nilai *piil pesenggiri*.

Pertama, strategi yang dilakukan, dalam ranah politik, berupa kebijakan pemerintah melalui perda yang dikeluarkan gubernur, maupun bupati dan walikota. Diantaranya, pemkab Tulang Bawang mewajibkan pemakaian bahasa Lampung *Papadun* setiap Senin oleh seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten. Alasannya adalah bahwa selama ini kurang ada penghargaan dari para pendatang pada keberadaan etnis Lampung, sementara masyarakat Lampung asli sendiri memberikan penghargaan kepada pendatang sebagaimana terkandung dalam unsur *piil pesenggiri nemui nyimah* (*Lampung Post*, 5 Agustus 2010: 1). Kebijakan yang sama juga diberlakukan oleh Walikota Bandar Lampung yang mengatakan “*tak pasang ornamen lihat saja nanti*” ketika menginstruksikan agar semua ruko, restoran, dan hotel wajib memasang ornamen khas Lampung pada bangunannya dengan tujuan supaya punya ciri dan dikenal daerah lain. Jika instruksi itu tidak diindahkan, dalam tengat waktu yang ditentukan, warga akan diberi teguran dan sanksi (Lihat *Tribun Lampung*, 22 Oktober 2010:15).

Bupati dan walikota dalam konteks ini, juga bertindak dan dipandang sebagai pelaku atau agen *ulun* Lampung. Kaum elit dianggap memiliki pengaruh besar untuk mengubah pola relasi antara etnis Lampung dengan pendatang, terutama melalui beberapa keputusan strategis yang memberi ruang kepada *ulun* Lampung untuk menjadi sejajar sekaligus sebagai pencairan stigma yang sebelumnya mempertanyakan identitasnya sebagai penduduk lokal. Pertanyaan ini muncul mengingat kaburnya identitas *ulun* Lampung karena posisi mereka semakin terdesak dan kurang dihargai, serta kurangnya pengenalan akan atribut mereka sebagai etnis lokal. Padahal menurut Barth (1969), kelompok etnik lokal dikatakan eksis ketika suatu identitas diklaim

menjadi miliknya dan didefinisikan orang lain sesuai dengan identitas tersebut, dapat berupa simbol-simbol, bahasa, atau upacara ritual untuk membedakan individu yang satu dengan lainnya. Artinya, dilihat dalam konteks itu setiap pendatang akan beradaptasi atau berupaya mengidentifikasi dirinya dengan budaya lokal atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal sebagai bentuk penghagaan akan identitas kelokalan suatu masyarakat. Hal ini kontradiktif dengan pendatang yang ada di Lampung. Pendatang di Lampung kurang memahami budaya masyarakat lokal, termasuk kemampuan menggunakan bahasa lokal sebagaimana yang lazim ditemukan di daerah lain. Selain itu, *ulun* Lampung sebagai pemakai bahasa lokal juga semakin sukar ditemukan di tempat publik sehingga kondisi ini semakin mempertegas posisi *ulun* Lampung berada dalam proses etnifikasi.

Menggunakan idiom budaya dalam tindakan pelaku adalah dan strategi baru karena kuatnya keinginan untuk diakui eksistensinya dalam struktur ekstenal. Tindakan para pejabat elit ini dimaknai sebagai resistensi untuk mendobrak dominasi pendatang, maupun respon *ulun* Lampung terhadap dinamika yang berkembang untuk menjadi sejajar dalam ranah sosial. Mereka memanfaatkan momen otonomi daerah dan isu putra daerah sebagai peluang untuk mengukuhkan dan pengakuan kembali identitasnya sebagai *ulun* Lampung dan jika memungkinkan mengambil alih posisi yang selama ini didominasi pendatang. Dengan demikian, pembentukan identitas juga menjadi salah satu gaya politik di kalangan politisi sehingga dalam kerangka ini mereka menggunakan berbagai strategi manipulasi atas simbol-simbol material untuk membentuk afiliasi baru dan dimana implikasi dari identitas ini dipertimbangkan sebagai bagian dari perubahan sosial (Schortman, Patricia, Marne, 2001). Kreasi akan identitas dan peran elit dalam pemaknaan *piil pesenggiri* menunjukkan bahwa selain diproduksi dan direproduksi identitas juga ditemukan kembali (*invented*) sebagai sesuatu yang dianggap menonjol dan dipamerkan kepada umum.

*Ulu*n Lampung juga mulai menepis pandangan yang menyangsikan kemampuan mereka sebagai orang yang malas dan tidak mampu bersaing dengan pendatang. Menduduki posisi strategis memang merupakan target yang saat ini mereka lakukan agar mereka dihargai dan tidak dipandang sebelah mata baik di kalangan masyarakatnya sendiri maupun oleh pendatang. Perjuangan untuk menempati posisi strategis dalam kekuasaan elite saat ini sebagai bentuk reproduksi identitas, dapat dilihat pada Tabel 1.

Kedua. Kesadaran akan perlunya identitas yang jelas dan dihargai dalam ranah atau medan kekuasaan sebagai modal berkontestasi diwujudkan dengan membentuk beberapa asosiasi independen yang mengakomodasi kepentingan *ulun* Lampung dalam pelbagai tindakan

Tabel 1. Karakteristik Kepala Daerah Tk. I/Tk. II Berdasarkan Etnis saat ini

Jabatan	Karakteristik		
	Berdasarkan Etnis		
	Lampung	Jawa	Lainnya
Gubernur Provinsi Lampung	V		
Wakil Gubernur		V	
Walikota Bandar Lampung	V		
Wakil Walikota			V
Walikota Metro		V	
Wakil Walikota	V		
Bupati Lam-Sel	V		
Wakil Bupati		V	
Bupati Kab. Lam-Teng		V	
Wakil Bupati	V		
Bupati Kab. Lam-Utara	V		
Wakil Bupati			
Bupati Kab. Lam-Tim		V	
Wakil Bupati	V		
Bupati Kab. Pesawaran	V		
Wakil Bupati		V	
Bupati Kab. Pringsewu	V	V	
Wakil Bupati	kosong		
Bupati Kab. Tanggamus	V		
Wakil Bupati		V	
Bupati Kab. Tulang Bawang	V		
Wakil Bupati		V	
Bupati Kab. Tulang Bawang Barat	V		
Wakil Bupati	V		
Bupati Kab. Mesuji		V	
Wakil Bupati			V
Bupati Kab. Way Kanan	V		
Wakil Bupati	V		
TOTAL	15	10	2

budayanya. Antara lain adalah dengan membentuk perkumpulan *Lampung Sai* (Lampung Bersatu), dan Majelis *Punyimbang* Adat Lampung (MPAL). Pembentukan asosiasi ini didukung oleh elemen masyarakat seperti tokoh adat, akademik, dan masyarakat umum. Asosiasi ini merupakan wadah konsultasi budaya bagi masyarakat yang membutuhkannya. Melalui perkumpulan ini, dilakukan kembali pengkajian akan sejarah dan budaya Lampung, sehingga menimbulkan rasa patriotisme bagi generasi muda. Pembentukan asosiasi sukarela ini adalah sebuah strategi baru “mengambil pengetahuan pendatang” karena perkumpulan yang bersifat kesukuan lazim dilakukan kelompok etnis yang jauh dari tanah asalnya.

Tindakan ini dipandang merupakan resistensi karena dapat dikatakan “menjarah pengetahuan kaum pendatang” untuk dipakai untuk memeperkuat solidaritas kelompoknya (Rutherford, 2000). Mengambil pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri dalam berkompetisi dalam internal masyarakatnya, sekaligus strategi untuk berhadapan dengan orang luar (pendatang) yang pengetahuannya telah mereka adopsi sehingga setiap hubungan atau relasi harus bermanfaat.

Dalam banyak hal *piil* menjadi alat pembenaran suatu tindakan sehingga seringkali *piil* menjadi “romantisme masa lalu” (dulu memiliki tanah yang luas, hidup boros dan pesta, tanaman dan hasilnya tinggal petik dari pohonnya). Hal inilah yang merupakan faktor penyebab semakin terdesaknya mereka oleh pendatang; karena etos kerja yang kurang. Mengubah citra seperti “*hati-hati dengan orang Lampung, kemana-mana selalu bawa piil*”, pemalas, kurang kreatif dan hanya suka menunggu hasil tanaman tanpa usaha maksimal merupakan pukulan bagi *ulun* Lampung (Hasil wawancara dengan informan). Menjadikan *piil pesenggiri* menjadi strategi identitas sosialnya penting karena bagi *ulun* Lampung *piil* merupakan sumber pengetahuan yang dimiliki masyarakat, dibatinkan (habitus) dalam kehidupan dunia sosial *ulun* Lampung (antar mereka sendiri maupun dengan orang lain). Melalui resistensi terjadi perbaikan struktur sehingga terjadi bolak-balik antara pelaku (agen) dengan struktur untuk mendapatkan kesejajaran dengan pendatang. Lihat Maunati (2004), yang mengkaji faktor-faktor yang terdapat dalam proses konstruksi citra identitas etnis. Pada tahap ini, *ulun* Lampung bukanlah sekedar mengembangkan atau mempertahankan kualitas kehidupan masa lalu, tetapi mereka juga melakukan invensi tradisi. Disisi lain, kekuatan dan kemampuan adaptasi dari tradisi tidak akan tumpang tindih atau tabrakan dengan tradisi yang baru. Artinya tradisi-tradisi lama yang hidup dalam tradisi baru akan selalu diperbaiki sehingga tetap seimbang. Mengacu pada konsep habitus Bourdieu, sebagai produk sejarah dan mitologi masa lampau, maka upaya “membangkitkan kembali” *piil pesenggiri* yang terbentuk dari habitus yang dibawa kedalam struktur sebagai arena erat kaitannya dengan kepemilikan modal yaitu (a) *modal ekonomi*, yakni sarana produksi dan finansial seperti kekayaan, (b) *modal kultural* berupa pengetahuan yang dimiliki baik formal maupun informal, (c) *modal sosial* adalah jaringan hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial, termasuk agama, (d) *modal simbolik*, yaitu semua bentuk pengakuan oleh kekelompok berupa nama besar, jabatan, gelar, kehormatan, ataupun prestise (Haryatmoko, 2010).

Reproduksi *piil pesenggiri* secara formal diinstitusikan ditampilkan dalam bentuk yang jelas dan berlaku untuk jangka waktu tertentu maupun jangka waktu lama, tidak lain karena didalamnya sarat nilai-nilai sebagai aturan-

aturan yang terbuka maupun tersembunyi yang secara tidak langsung menyiratkan kontinuitas dari masa lalu secara otomatis dalam pembentukan identitasnya. Jika *piil pesenggiri* adalah tradisi yang direkacipta, dimodifikasi dari nilai lama yang dimaknai sebagai identitas baru, merupakan bagian sejarah dari pengalaman individu dan kolektif etnis Lampung sebagai penduduk asli (*indigenous people*). Meniru sejarah *adok* yang dahulu diberikan oleh Banten yang relasi kuasanya lebih tinggi, sekarang *ulun* Lampung memberikan *adok* (gelar) kepada pendatang, atau mereka yang menginginkannya merupakan kontinuitas nilai-nilai dari masa lalu yang mengalami komodifikasi. Melalui metafora kekerabatan ‘angkat saudara’, adalah strategi *ulun* Lampung untuk dihargai. Ketika pendatang menerima tawaran untuk diberikan *adok*, maka terjadi hubungan simbiosis, yaitu penghargaan pendatang akan eksistensi *ulun* Lampung sehingga prinsip kesejahteraan terpenuhi.

Struktur eksternal adalah arena atau ranah yang mengandung jalinan relasi antar posisi-posisi objektif yang bersifat dinamis untuk memanfaatkan *event* sebagai kesempatan (peluang) untuk eksis, sehingga di dalam ranah inilah *ulun* Lampung memperjuangkan identitasnya. Resistensi terhadap dominasi pendatang juga merupakan upaya untuk mengembalikan martabat dan melahirkan pencitraan baru *ulun* Lampung (Bourdieu, dalam Randal, 2003). Dukungan pemerintah juga sangat besar dalam menumbuhkan kesadaran identitas dan eksistensinya *ulun* Lampung di tengah masyarakat yang heterogen, seperti dituturkan informan: “memperbaiki image atau stigma orang Lampung yang terlanjur dicap malas, bodoh, sombong, egois, tidak memiliki keinginan maju, kurang daya saing.” Melalui kegiatan kebudayaan yang semakin sering dipertontonkan kepada umum, seperti festival budaya, maupun ajang *muli-mekhanai* (bujang-ggadis) telah menjadi agenda rutin pemerintah untuk mempromosikan Lampung baik secara nasional maupun internasional (Corr & Harriet, 2003).

Dengan demikian, membangkitkan *piil pesenggiri* tetap melestarikan masa lalu dan mengorganisasikan yang masih dianggap sesuai pada masa kini, yaitu dengan memasukkan kembali sejarah masa lalu ke dalam tradisi baru. Seperti pemberian *adok* dengan cara baru, festival budaya untuk menjembatani antar generasi dan pembentukan wadah yang menampung aspirasi *ulun* Lampung (MPAL) adalah bentuk eksistensi identitasnya. Festival budaya Krakatau adalah ajang pameran budaya Lampung secara nasional. Berbagai atraksi seni budaya Lampung disajikan dalam kegiatan ini. Festival ini merupakan ajang lomba tahunan budaya Lampung yang diikuti oleh setiap daerah tingkat II yang ada di Lampung. Demikian juga dengan ajang *muli-mekhanai*. Salah satu materi lomba yang disajikan dalam ajang tersebut adalah pengetahuan akan budaya

Lampung dan kemampuan berbahasa Lampung. Pesertanya tidak dibatasi hanya bagi *ulun* Lampung saja, namun terbuka bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam ajang tersebut, salah satu materi yang diujikan adalah pengetahuan peserta akan budaya Lampung dan kemampuan berbahasa Lampung. Mensyaratkan materi uji yang sifatnya lokal kepada umum merupakan strategi budaya agar ke-lokalannya diakui dan semakin kokoh dalam ranah publik. Adanya peningkatan pengguna bahasa lokal, agar menjadi digemari oleh generasi muda *ulun* Lampung dimana padahal selama ini bahasa Lampung hanya dipakai di kalangan terbatas (pada acara adat dan kalangan orangtua dan tokoh adat saja). Sifat eksklusivisme bahasa Lampung mengalami perubahan menjadi inklusivisme, enak didengar, dan diharapkan pemakainya dapat dengan mudah ditemukan di ruang-ruang publik sebagaimana pengguna bahasa Jawa yang dominan.

Ketiga. Saat ini, usaha para pelaku demikian gencar untuk mengukuhkan identitas mereka ke ranah atau medan kekuasaan dengan menggunakan budaya sebagai modal untuk ke luar dari inferioritas yang selama ini mereka alami. Menggunakan modal budaya dan modal simbolik *juluk adok* sebagai salah satu inti dasar *piil pesenggiri* adalah strategi yang paling sering dilakukan. Upacara *adok* atau ada yang menyebutnya *mewari* adalah ritual pemberian gelar. Begitu pentingnya *adok* bagi *ulun* Lampung, dan untuk memperolehnya tidak jarang seseorang rela berkorban apa saja, bahkan harta benda, bahkan nyawa sekalipun. Sesuai dengan dasar pembedukannya, dahulu *adok* hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan, *punyimbang* dan tokoh adat saja. Dalam beberapa hal, memang telah terjadi perubahan dalam cara *beradok*. Namun, keinginan untuk memperoleh gelar *adok* (secara adat) masih merupakan cita-cita setiap *ulun* Lampung. Bahkan, sampai sekarang pun masih dapat ditemukan pemaknaan *piil pesenggiri* yang berlandaskan *adok* saja (irasional) tanpa memberi makna yang positif. Mahalnya biaya *begawi adok* yang bahkan mencapai ratusan juta rupiah menyebabkan banyak orang yang jatuh miskin karena pesta gelar tersebut. Namun demi *piil*, yang ber-*juluk-adok* (bernama dan bergelar) banyak yang rela melakukannya (Ortner, 2002). Dalam struktur internal *ulun* Lampung, yang lazim dipakai bukan nama kecil, tetapi nama adat yang sangat hebat, seperti Batin Bandar Kusuma, atau Tuan Sampuna Jaya. Hal ini menyebabkan panggilan gelar lebih disukai, karena lebih bergengsi, lebih bermartabat, apalagi mengacu kepada prinsip dasar *adok*. Bahkan, nama kecil akan hilang dengan sendirinya karena tertutupi oleh nama besar yang diperoleh melalui upacara adat besar (*begawi*). Pemakaian nama besar ini setara dengan biaya yang dihabiskan untuk memperolehnya. Gelar atau *adok* yang diberikan kepada seseorang menunjukkan tingkat kedudukannya dalam masyarakat, sehingga dalam

struktur internal Lampung, akan mudah ditentukan “siapa” dan “apa” kedudukannya dilihat dari gelar yang disandangnya. Semakin hebat gelarnya, semakin tinggi nilai prestise yang dimiliki. Wajar, jika nama gelar ini menjadi panggilan favorit bagi mereka yang telah memiliki gelar adat (*adok*).

Dalam konteks dinamika dan kontestasi dengan pendatang saat ini, *adok* juga mengalami redefinisi, yaitu dimaknai sebagai gelar pendidikan. Ber-juluk atau memiliki nama besar adalah jika seseorang memiliki nama baik, bergelar dalam adat, diakui secara umum, dan terhormat. Munculnya kesadaran baru akan pemaknaan *adok* ini menyebabkan pelaku *ulun* Lampung mengejar ketertinggalannya dalam pendidikan, namun tetap tanpa melupakan *adok* dalam adat. Merunut ke sejarahnya, *adok* sebagai tanda bahwa seseorang ber-*piil* (harga diri) yang dulunya diberikan Banten sebagai bentuk kerja sama politik. Dalam hubungan timbal balik antara keduanya, Banten memberikan gelar kepada mereka yang saat itu melakukan “*seba*” sebagai hadiah (Vickers, 2009). *Seba* adalah pemberian upeti atau penghormatan kepada penguasa.

Mengambil dan mengolah menjadi modal budaya adalah strategi adopsi budaya “dahulu menerima” sebagai bentuk kontestasi *ulun* Lampung agar sejajar dengan Banten yang memiliki gelar, sedangkan sekarang member sebagai adalah resistensi terhadap keberadaan pendatang. Resistensi atau perlawanan secara halus untuk menunjukkan identitasnya sebagai etnis lokal; salah satunya adalah dengan diberikannya *adok* secara massal (sebanyak 303 orang) oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada orang non-Lampung yang dilegitimasi oleh MPAL. Strategi *ulun* Lampung saat ini adalah “melakukan hal yang sama”, artinya “mengambil dan menggunakan” yang dahulu mereka dapatkan dari Banten (adopsi gelar, yaitu *adok*, yang ketika itu dimaknai sebagai mengangkat saudara) yang sekarang diberlakukan kembali dengan pendatang (juga dengan angkat saudara). Secara politis, pandangan ini dimaknai bahwa, ketika seseorang telah menjadi saudara tentu tidak akan saling menyakiti, sedangkan dalam kaca mata yang lain, menurut informan, “pemberian *adok* ini sebagai upaya menghindarkan konflik antaretnis sekaligus sebagai peredam konflik”.

Dalam konteks kekuasaan simbolik Bourdieu, si pemilik *adok* memberikan kepada pendatang (penerima *adok*) sebuah simbol kehormatan, sehingga dalam relasi kekuasaan si pemberi berada dalam posisi relasi kuasa yang lebih tinggi daripada si penerima. Memberikan gelar adalah perlawanan yang sifatnya *hidden* atau resisten terhadap dominasi pendatang selama ini. Resistensi, menurut Scott (1990) merupakan reaksi terhadap adanya dominasi yang kuat terhadap yang lemah di dalamnya ada hubungan kekuasaan antara mereka yang dominan dan subordinat. Menggunakan

piil pesenggiri “*juluk adok*” merujuk ke teori Scott. Apa yang dilakukan *ulun* Lampung adalah resistensi akan keberadaan mereka yang selama ini kurang dihargai dan ditempatkan dalam stigma negatif. *Adok* adalah simbol-simbol strategi. *Adok* menjadi sarana pengakuan identitas sehingga dapat dilihat sebagai dasar dari suatu tindakan, gagasan yang berkesinambungan, sarana untuk pencukupan diri, pembangunan, dan dialektika batin. Melalui metafora kekerabatan (angkat saudara), *ulun* Lampung mengambil kembali posisinya dari para pendatang yang dominan. Sebaliknya, para pendatang menginginkan penghormatan akan budaya dan perbedaan. Kekerabatan adalah logika dunia yang partikularistik sebagai afiliasi keluarga, dan memberi *adok* menggambarkan ide ras akan adanya suatu “keluarga.” Dengan demikian, identitas sebagai konstruksi dapat dilihat dalam dua realitas sosial, pertama, didefinisikan pihak yang berada dalam struktur kekuasaan yang dominan, dan kedua, oleh individu dalam kehidupan kesehariannya, dan antara keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi sehingga memiliki kesamaan atau bahkan perbedaan (Sutterluty, 2006). Bagi pendatang, apa yang mereka lakukan bukan karena paksaan karena meskipun mereka bukan etnis Lampung, mereka juga bagian dari masyarakat, dan para pendatang ini juga ingin dilihat sebagai orang lokal (Honnet, 2001).

Dalam proses itu, maka formasi dan konstruksi identitas tidak pernah mengalami keajegan. Terdapat situasi dan peristiwa yang membuat formasi dan konstruksi identitas tampak tunggal, tetapi juga ada kalanya plural, yang disebut segmentasi. Segmentasi (Baunmann & Gingrich, 2004) merupakan proses yang memungkinkan terjadinya fusi (*peleburan*) identitas dalam suatu situasi atau konteks yang sensitif, atau juga melingkupi (*encompassment*), suatu proses memasukkan yang lain (*other*) menjadi bagian dari diri (*self*). Ketika proses peleburan itu terjadi, maka sangat dimungkinkan pula terjadinya orientalisasi (*orientalization*) ketika setiap subjek yang mengidentifikasi diri memiliki “kesamaan yang terbaik” dalam menciptakan suatu representasi yang ideal, yang lalu dipertentangkan atau dipakai untuk merendahkan yang lain. Mengacu kepada oposisi biner identitas ini, maka *ulun* Lampung dalam konteks ini justru bertindak ekstrem karena oposisi Binner itu sendiri selain masih diberlakukan dalam struktur internal, juga dalam struktur eksternal, yaitu kepada orang luar melalui metapora kekerabatan (*kinship*), yaitu *adok* yang dikomodifikasi.

Juluk adok sebagai unsur dalam *piil pesenggiri* juga berelasi dengan *nemui nyimah*, yaitu sifat menghargai tamu. Metafora “tamu” salah satu faktor yang menyebabkan jarang terjadi konflik di daerah Lampung. Unsur lainnya adalah *nengah nyappor*, artinya menjadi orang yang dapat diandalkan atau penengah ketika ada permasalahan. *Nyappor* artinya bercampur, berbau dan

mudah berintegrasi dengan siapapun. Demikian juga dengan unsur *sakai sambayan*, yang selama ini dikenal sebagai gotong royong. *Sakai sambayan* sekarang dimaknai sebagai musyawarah untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Permasalahan yang terjadi di Lampung yang berkaitan dengan *piil pesenggiri* sangat rawan dengan konflik seperti konflik tanah, perkawinan, maupun hubungan dengan pendatang. Asosiasi sukarela seperti MPAL dan Lampung *Sai* adalah salah satu akomodasi kepentingan masyarakat Lampung. Asosiasi ini memang tidak terlepas dengan keberlangsungan adat dan pemecahan kasus-kasus di masyarakat yang sedapatnya diselesaikan secara adat saja baik menyangkut perselisihan antar *ulun* Lampung, maupun dengan non Lampung. Penyelesaian secara adat dan damai, merupakan alternatif yang lebih anggun yang didasari oleh nilai luhur *piil pesenggiri*. Salah satu kasus yang diselesaikan dengan cara terhormat atau atas dasar *piil pesenggiri* adalah kasus salah tembak oleh oknum polisi. Peristiwa salah tembak yang dilakukan tujuh oknum anggota kepolisian Polsek Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) pada 28 Oktober 2010 terhadap dua orang warga Desa Muara Putih, kecamatan setempat, berakhir damai. Perdamaian dilakukan secara adat dan disaksikan sejumlah warga dan *penyimbang* adat Lampung dengan membayar biaya perdamaian, yaitu membeli kerbau, denda berjabat tangan dengan sejumlah *penyimbang*, denda buka bicara, biaya *penggalang sila*, dan biaya lainnya. Oleh karenanya, *piil pesenggiri* dalam masyarakat Lampung merupakan kristalisasi nilai-nilai dan aturan yang ada masyarakat yang tidak perlu dituliskan tetapi tetap bertumbuh dan dijalankan dalam masyarakat sebagai makhluk sosial dan budaya.

4. Simpulan

Kesadaran kultural untuk sejajar dengan pendatang sebagai *sense of collectivism* dengan menemukan nilai yang bersumber dari tradisi mereka membuat *ulun* Lampung dapat mengangkat kembali identitas mereka sebagai etnis lokal yang bermartabat. Nilai yang terdapat dalam *piil pesenggiri* diolah sehingga merupakan modal budaya dan modal simbolik dalam ranah kontestasi dengan pendatang. Berangkat dari pemaknaan dan redefinisi terhadap *piil pesenggiri* yang nilai-nilainya disegarkan kembali (invensi tradisi), menunjukkan: (1) *piil pesenggiri* bukanlah produk yang statis, tetapi bersifat kontekstual, dikonstruksi ulang sebagai resistensi secara halus terhadap dominasi pendatang; (2) produksi dan reproduksi *piil pesenggiri* sebagai "*becoming identity*" adalah kemampuan menginternalisasi eksternalitas, dan mengekternalisasi internalitas menjadi titik balik dan modal eksistensinya sebagai *ulun* Lampung dalam berkontestasi; (3) redefinisi *piil pesenggiri* merupakan hasil interaksi dengan pendatang dalam ruang dan waktu, yang tidak

dapat dipisahkan dari habitus *ulun* Lampung, dan sebagai identitas, *piil pesenggiri* harus diolah dan dijadikan modal sesuai dengan *habitus* mereka; (4) strategi *ulun* Lampung dengan merespon pendatang melalui nilai *piil pesenggirinya* dalam hubungan multikultur dapat dijadikan model dalam hubungan antar etnis di Indonesia, yaitu bahwa resistensi dapat dilakukan secara halus dan tanpa disadari sehingga konflik dapat dieliminasi.

References

- Barth, F. (1969). *Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference*. Oslo: Scandinavian University Press.
- Baunmann, G., & Gingrich, A. (2004). *Grammars of identity/alterity a structural approach*. Amsterdam: Berghahn Books.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline Of A Theory Of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1979). *Algeria 1960*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu dalam Johnson, Randal (Ed). (2003). *The Field of Cultural Production: Essay on Art and Literature*.
- Castles, S., & Miller, M.J. (2003). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. (third revised edition) Basingstoke and New York: Palgrave-Macmillan and Guilford Books.
- Comaroff, J.L., & Jean, C. (2009). *Ethnicity.Inc*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Corr, R., & Harriet L.W. (2003). Ritual, knowledge, and the politics of identity in andean festivities. *Ethnology*, 42, 39-54.
- Hadikusuma, H. (1990). *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.
- Haryatmoko (2010). Habitus dan Kapital dalam Strategi Kekuasaan Teori Strukturasi Pierre Bourdieu dengan Orientasi Budaya.
- Honneth, A. (2001). Invisibility: on the epistemology of "recognition". *The Aristotelian Society Supplementary*, 75, 111-26.
- Maunati, Y. (2004). *Identitas dayak komodifikasi dan politik kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Oommen, T.K. (1997). *Kewarganegaraan, kebangsaan & etnisitas* (Munabari Fahlesa trans.). Bantul: Kreasi Wacana Offset.

Ortner, S.B. (2002). Burned Like a Tattoo' High School Social Categories and American Culture, *Ethnography*, 3(2), 115-148.

Ruthernford, D. (2000). The white edge of the margin: textuality and authority in Biak, Irian Jaya, Indonesia. *American Ethnologist*, 27(2), 312-339.

Scott, J. (1990). *Domination and the arts of resistance, hidden transcripts*. London: University Press.

Schortman, E.M., Patricia, A.U., & Marne, A. (2001). Politics with style: identity formation in prehispanic southeastern mesoamerica. *American Anthropologist*, 103(2), 312-330.

Sokefeld, M. (1999). Debating self, identity, and culture in anthropology. *Current Anthropology*, 40(4), 417-447.

Sutterluty, F. (2006). The belief in ethnic kinship: A deep symbolic dimension of social inequality. *Ethnography*, 7(2): 179-207.

Vickers, A. (2009). *Peradaban Pesisir Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*. Bali: Udayana University Press.